

ABSTRAK

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki peninggalan sejarah. Tidak heran jika kabupaten memiliki banyak peninggalan sejarah seperti halnya Petilasan Tribuana Tunggaladewi yang berada di desa Klinterjo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode snowball dengan jumlah informan empat orang. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk peran pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya sampai dengan pemanfaatannya dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melestarikan situs budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelestarian petilasan Tribuana Tunggaladewi, dimana situs petilasan Tribuana Tunggaladewi masuk dalam wilayah Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN). Hal ini yang berperan penting dalam pelestarian merupakan kementerian hal ini sudah diatur dalam Undang – Undang cagar budaya No 10 tahun 2011. Seperti halnya dalam eksplorasi dimana hal tersebut dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur (BPK) dalam pengawasan kementerian, hal ini membuat pemerintah kabupaten Mojokerto dalam pemanfaatan terhalang oleh regulasi dari kementerian, akan tetapi dengan adanya sekat tersebut tidak membuat peran pemerintah kabupaten Mojokerto untuk lepas tangan sebagai regulator seperti sosialisai terhadap warga desa Klinterjo dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan juga dari BPK wilayah XI Jawa Timur. Sedangkan fasilitator seperti halnya dalam pembuatan jalan menuju area petilasan ataupun fasilitas penunjang seperti pembuatan musholla di dalam area petilasan, toilet, maupun pendopo. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelestarian petilasan Tribuana Tunggaladewi terdapat stakeholder yang menaungi dalam pelestarian cagar budaya, baik dari pemerintah pusat, kabupaten maupun pemerintah desa.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Situs Budaya

ABSTRACT

Mojokerto Regency is one of the areas in East Java which has historical heritage. It is not surprising that the district has many historical relics, such as the Petilasan Tribuana Tunggadewi in Klintarjo Village, Sooko District, Mojokerto Regency. This study uses a qualitative method. Technical analysis of this data using descriptive qualitative. The data collection technique uses the snowball method with four informants. Source of data obtained based on primary data and secondary data. To collect data researchers used observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aims to determine the form of the role of local governments in preserving cultural sites up to their utilization and also to determine the supporting and inhibiting factors in preserving cultural sites. The results of this study indicate that there are several stakeholders who are responsible for preserving the Tribuana Tunggadewi ruins, where the Tribuana Tunggadewi ruins are included in the National Cultural Heritage Area (KCBN). This is what plays an important role in the preservation of the ministry, this has been regulated in the Cultural Heritage Law No. 10 of 2011. As is the case in excavations where this is carried out by the East Java Region XI Cultural Preservation Center (BPK) under the supervision of the ministry, this makes the Mojokerto district government in its utilization was hindered by regulations from the ministry, but the existence of this partition did not make the role of the Mojokerto district government hands off as a regulator such as outreach to the residents of Klintarjo village in collaboration with the local village government and also from BPK region XI East Java. While the facilitator is like in making roads leading to the petilasan area or supporting facilities such as building a prayer room in the petilasan area, toilets, and the pavilion. From the results of this study it can be concluded that the preservation of the Tribuana Tunggadewi ruins has stakeholders who oversee the preservation of cultural heritage, both from the central, district and village governments.

Keywords: The Role of Local Government, Cultural Sites